

## **STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KOTA BLITAR TAHUN 2016**

Gyska Indah Harya

[gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id](mailto:gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id)

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### **ABSTRAK**

Strategi penanggulangan kemiskinan daerah bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi umum dan karakteristik kemiskinan di Kota Blitar; (2) merumuskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2016-2020.

Metode yang digunakan dalam kajian ini khususnya penetapan lokasi adalah metode sengaja (purposive). Metode pengumpulan data dengan metode pencatatan. Metode analisis data dengan analisis deskriptif.

Hasil Kajian, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 10 (sepuluh) indikator utama bidang pendidikan, ditemukan ada 1 indikator yang masih bermasalah pada posisi relatif Kota Blitar terhadap capaian di tingkat Provinsi yaitu indikator APM SD/MI. Untuk itu indikator APM SD/MI ini menjadi prioritas pada bidang pendidikan di Kota Blitar. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 4 (empat) indikator utama bidang kesehatan tidak bermasalah. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang ketenagakerjaan, terdapat indikator pekerja yang bekerja pada sektor non formal yang belum tersedia data untuk di analisa. Untuk 2 indikator lainnya telah menunjukkan kondisi yang baik sehingga tidak menjadi prioritas pada bidang ketenagakerjaan di Kota Blitar. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang infrastruktur dasar di Kota Blitar, tidak ada indikator yang bermasalah pada posisi perkembangan antar waktu dan relevansi dengan perkembangan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 2 (dua) indikator utama bidang ketahanan pangan di Kota Blitar, kedua indikator bermasalah pada posisi perkembangan antar waktunya. Untuk itu indikator perkembangan harga beras dan perkembangan harga bahan pokok lainnya menjadi prioritas bidang ketahanan pangan di Kota Blitar.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Strategi, Penanggulangan.**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang.**

Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut bergabung dalam penandatanganan kesepakatan MDG's, saat ini telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai salah satu komitmen keikutsertaan dalam komitmen global tersebut. Bahkan pada bulan Maret 2010 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak

dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antar lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

### **Permasalahan**

Kota Blitar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan dimana salah satunya adalah capaian perkembangan prosentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional menunjukkan trend menurun, pada tahun 2003 tercatat sebesar 12,39 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 7,15 persen. Dan sejak tahun 2011 Kota Blitar telah mencapai target capaian MDG's yang menetapkan angka maksimal 7,50 persen. Meskipun menunjukkan trend menurun, apabila dilihat pada 5 tahun terakhir, capaian prosentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan pada 2013 mengalami sedikit kenaikan terhadap capaian tahun sebelumnya (2012), dan pada tahun 2014 capaian prosentase penduduk miskin kembali turun dibandingkan capaian tahun 2013, meskipun masih lebih tinggi terhadap capaian tahun 2012 dan 2011. Dengan penyusunan dokumen SPKD Tahun 2016-2021, disamping sebagai langkah menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar, juga diharapkan arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar dapat sejalan dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

### **Tujuan Kajian**

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah:

1. mengetahui kondisi umum dan karakteristik kemiskinan di Kota Blitar;
2. merumuskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2016-2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kemiskinan.**

Pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran. Sebelumnya, kemiskinan dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, seperti aspek pendapatan, pengeluaran atau aset/faktor produksi. Pemahaman tersebut diantaranya seperti direpresentasikan oleh dua lembaga keuangan internasional, World Bank dan Asian Development Bank (ADB). World Bank menetapkan

kategori miskin bila tingkat pengeluaran kurang dari US\$ 2 PPP per orang per hari. Pandangan tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mc. Quibria, seorang ekonom senior pada Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, seseorang maupun sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan dikatakan miskin bila tidak mampu menggunakan aset/modal yang dimilikinya. Seseorang miskin, bila hanya punya aset tenaga namun tidak bekerja atau tinggal di desa, namun tidak punya tanah (sawah atau kebun).

Saat ini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang mencakup dimensi kehidupan yang jauh lebih luas. Wacana tentang kemiskinan telah bersifat multi dimensi, baik budaya, sosial, ekonomi maupun politik. Dampak kemiskinan juga disadari bersifat multi dimensi. Karenanya, strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinanpun cenderung menjadi komprehensif dan lintas sektor. Kemiskinan juga dapat di pandang dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dengan pendekatan berdasar identifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan atau dengan kata lain kemiskinan relatif berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.

Disamping mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan sehingga dihasilkan data makro kemiskinan berupa angka jumlah penduduk miskin yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa, Pemerintah melalui BPS juga melakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan akses terhadap kebutuhan/pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan) yang dicerminkan dalam 14 indikator. Angka yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan ini berupa data jumlah Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga) dan data jumlah (individu/jiwa) anggota Rumah Tangga. Bahkan sejak tahun 2005 melalui survey PSE-05 dan di tahun 2008 diperbaharui melalui PPLS-08 dan PPLS-2011 (pada tahun 2015 diperbaharui kembali melalui PBDT-2015) dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat rumah tangga. Data yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut dengan data mikro kemiskinan.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam kajian ini khususnya penetapan lokasi adalah metode sengaja (purposive). Metode pengumpulan data dengan metode pencatatan. Metode analisis data dengan analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Umum Kemiskinan Kota Blitar.**

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kota Blitar tahun 2014 adalah sebesar 9.800 jiwa atau sekitar 7,15 persen<sup>1)</sup> dari jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun yang sama. Kondisi prosentase kemiskinan Kota Blitar lebih rendah (lebih baik) bila dibanding capaian angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional, dimana

<sup>1)</sup> Angka kemiskinan ini sudah berada di kisaran target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan sebesar 6-8%.

prosentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 12,73 persen sedangkan capaian secara Nasional adalah 11,47 persen.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan prosentase kemiskinan Kota Blitar selama periode 2003-2014, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.

Berdasarkan pada 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2010 jumlah penduduk miskin Kota Blitar sebanyak ±10.069 jiwa atau sebesar 7,63 persen dari jumlah penduduk saat itu dan pada tahun 2011 dan 2012, jumlah penduduk miskin turun menjadi 7,12 persen (2011) dan 6,73 persen (2012). Tahun 2013 angka kemiskinan Kota Blitar naik menjadi 7,39 persen (10.052 jiwa). Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi ±9.800 jiwa atau sebesar 7,15 persen.

Dengan perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2003-2014 yang menunjukkan trend menurun, mengindikasikan bahwa kebijakan maupun program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif mengurangi angka kemiskinan. Meski demikian perlu menjadi perhatian mengingat trend pada 4 tahun terakhir (2011-2014) menunjukkan trend yang sedikit meningkat, karena angka kemiskinan tahun 2014 (=7,15%) sedikit lebih tinggi terhadap angka tahun 2011 (=7,12%) dan 2012 (=7,39%).

Meskipun pada tahun 2013 prosentase penduduk miskin sempat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi secara umum, upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar selama periode tahun 2010-2014 relevan dengan tujuan dan upaya-upaya di Provinsi Jawa Timur maupun upaya secara Nasional.

Disamping jumlah penduduk miskin dan prosentase penduduk miskin pada periode 2010-2014, indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) di Kota Blitar juga menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif, meskipun demikian dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun (gambar 12).

Dengan perkembangan  $P_1$  yang semakin kecil, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Demikian halnya dengan nilai  $P_2$  yang semakin kecil berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin kecil.

Meskipun perkembangan indeks  $P_1$  dan  $P_2$  Kota Blitar selama periode tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif, perkembangan indeks  $P_1$  dan  $P_2$  Kota Blitar selama periode ini memiliki relevansi dengan perkembangan indeks  $P_1$   $P_2$  yang terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional (gambar 13).

### **Prioritas Intervensi Kebijakan Bidang Pendidikan.**

Umumnya, masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal. Sebagian penduduk keluarga miskin hanya berpendidikan rendah karena mereka masih menganggap biaya sekolah relatif mahal. Tidak adanya/kurangnya kesempatan pendidikan non formal serta tidak mampu mengakses teknologi praktis. Pendidikan ke-cakapan hidup (*life skills*)

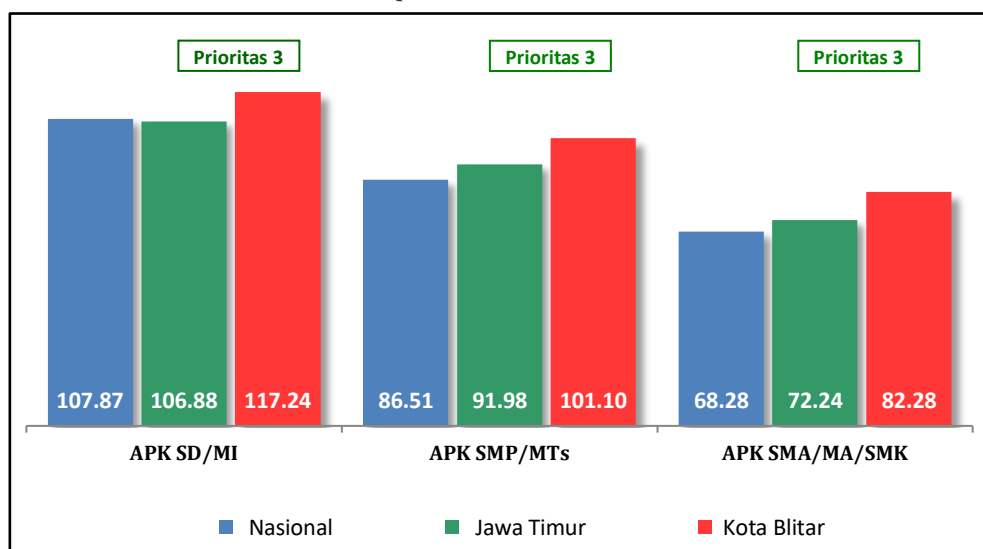
yang sesuai kebutuhan juga masih sulit didapat. Kemudian sebagian dari rumah tangga miskin masih berpandangan bias gender dalam hal pendidikan dimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam menempuh pendidikan. Pola pikir masyarakat masih lebih menomor satu-kan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur perumahan sehingga masih ada yang menganggap pendidikan kurang penting.

### Angka Partisipasi Kasar.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kota Blitar pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 117,24 persen, sementara APK SD/MI Provinsi Jawa Timur sebesar 106,88 persen dan capaian secara Nasional sebesar 107,87 persen. Dengan demikian capaian APK SD/MI Kota Blitar untuk tahun 2014 berada di atas (lebih baik) capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga dalam penentuan prioritas intervensi berdasar posisi relatif terhadap capaian Provinsi dan Nasional berada di zona hijau atau menjadi prioritas 3. Demikian pula dengan capaian APK SMP/MTs Kota Blitar untuk tahun 2014 adalah sebesar 101,10 persen dan apabila dibandingkan dengan capaian APK Provinsi Jawa Timur yang sebesar 91,98 persen dan capaian Nasional sebesar 86,51 persen, maka kondisi capaian APK SMP/MTs di Kota Blitar adalah lebih baik dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional, sehingga dalam penentuan prioritas intervensi berada di zona hijau atau menjadi prioritas 3.

Untuk APK SMA/SMK/MA Kota Blitar, pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 82,28 persen, sementara capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional berturut-turut adalah 72,24 persen dan 68,28 persen. Dengan kondisi tersebut, maka capaian APK SMA/SMK/MA juga berada di atas capaian Provinsi maupun Nasional, sehingga dalam penentuan prioritas intervensi kebijakan berdasarkan posisi relatif capaian terhadap Provinsi dan Nasional berada pada zona hijau atau dengan kata lain menjadi prioritas 3.

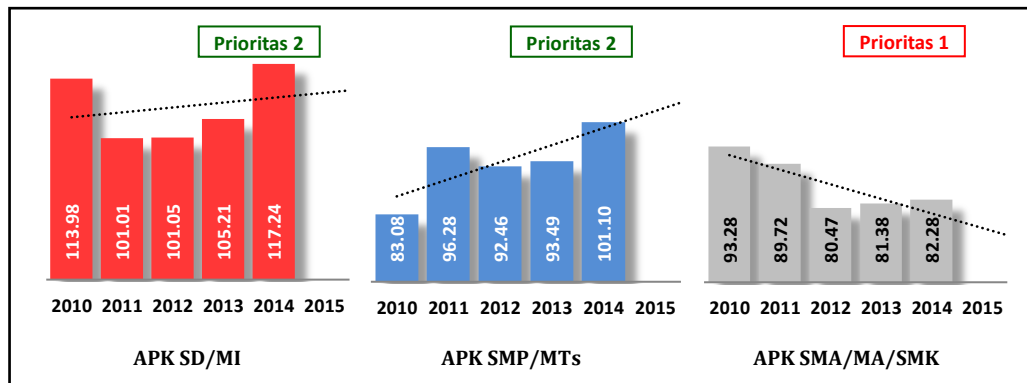
Gambar 1  
Posisi Relatif APK SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK  
Kota Blitar terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2014



Sumber: Publikasi BPS Jatim dan Dinas Pendidikan Kota Blitar

Selama kurun waktu tahun 2010-2014, capaian APK untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Blitar menunjukkan trend perkembangan yang meningkat. Dengan kecenderungan perkembangan yang meningkat (semakin membaik) maka indikator ini berdasarkan perkembangan antar waktu menjadi prioritas 2 dalam intervensi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Sementara itu untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK menunjukkan trend menurun sehingga menjadi prioritas 1.

Gambar 2  
Perkembangan dan Efektifitas Capaian APK  
Kota Blitar, Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dengan asumsi bahwa, efektifitas program pembangunan telah berjalan dengan baik bila indikator terkait untuk tahun yang bersangkutan menghasilkan capaian yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya, maka berdasarkan gambar 16 di atas nampak bahwa:

1. meskipun selama tahun 2010-2013 perkembangan capaian APK SD/MI dan SMP/MTs meskipun bersifat fluktuatif akan tetapi secara umum menunjukkan trend yang meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian APK SD/MI dan SMP/MTs berjalan efektif;
2. hal yang sedikit berbeda terjadi pada perkembangan APK SMA/MA/SMK, yang menunjukkan trend menurun maka dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan selama 2010-2014 belum berjalan efektif untuk meningkatkan APK SMA/MA/SMK, meski pada tahun 2014 sedikit membaik dibanding tahun 2013.

Bila capaian APK SD/MI Kota Blitar tahun 2010-2014 dibandingkan dengan perkembangan capaian APK SD/MI di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional pada periode yang sama, maka nampak bahwa trend perkembangan APK SD/MI Kota Blitar yang fluktuatif dengan trend meningkat tidak relevan terhadap trend perkembangan APK SD/MI Provinsi Jawa Timur maupun Nasional yang menunjukkan trend menurun. Sehingga dalam penentuan prioritas berdasarkan relevansi, indikator APK SD/MI Kota Blitar menjadi prioritas 3.

Secara umum perkembangan APK SMP/MTs Kota Blitar selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend meningkat dan memiliki relevansi dengan perkembangan yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan capaian secara Nasional. Khusus pada tiga tahun terakhir (2012-2014)

perkembangan APK SMP/MTs di Kota Blitar menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Blitar telah sejalan dalam mendukung Provinsi Jawa Timur dan Nasional guna me-ningkatkan capaian APK ini. Dengan demikian indikator ini menjadi prioritas 4.

Sementara itu, perkembangan capaian APK SMA/SMK/MA Kota Blitar untuk tahun 2010-2014 apabila disandingkan dengan perkembangan capaian APK di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, nampak bahwa perkembangan capaian APK SMA/SMK/MA Kota Blitar yang menunjukka trend menurun tidak relevans dengan dengan perkembangan di tingkat Provinsi maupun Nasional yang menunjukkan trend meningkat. Hal ini men-jadi indikasi bahwa upaya Pemerintah Kota Blitar pada periode tersebut belum sejalan dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga indikator ini menjadi prioritas 1.

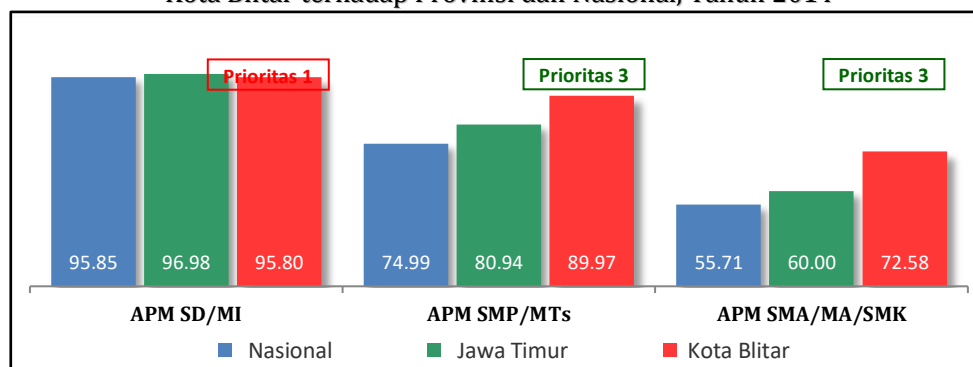
### **Angka Partisipasi Murni.**

Berdasarkan data yang tersedia, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI sederajat di Kota Blitar pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 95,80 persen, dan APM SMP/MTs adalah sebesar 89,87 persen, sedangkan APM SMA/MA/SMK sebesar 72,58 persen. Hal ini berarti bahwa di Kota Blitar pada tahun 2014 telah  $\pm 96$  persen anak usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usia untuk jenjang pendidikan SD, dan sekitar 90 persen anak usia 13-15 tahun telah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usia untuk jenjang pendidikan SLTP, sementara itu hanya sekitar 73 persen anak usia 16-18 tahun yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usianya (pendidikan SLTA sederajat).

Sementara itu pada tahun yang sama capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional menunjukkan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur capaian APM SD/MI sebesar 96,98 persen, APM SMP/MTs sebesar 80,94 persen, dan APM SMA/MA/SMK sebesar 60,00 persen, dan capaian secara Nasional untuk APM SD/MI sebesar 95,85 persen, APM SMP/MTs sebesar 74,99 persen, dan APM SMA/MA/SMK sebesar 55,71 persen.

Dengan kondisi tersebut di atas, capaian APM SD/MI di Kota Blitar berada sedikit di bawah (lebih buruk) rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional, sehingga berdasarkan posisi relatif terhadap capaian Provinsi maupun rata-rata capaian secara Nasional, capaian APM SD/MI Kota Blitar berada pada zona merah dan menjadi prioritas 1. Sedangkan capaian APM SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang berada di atas (lebih baik) dari rata-rata capaian Provinsi dan Nasional berada pada zona hijau dan menjadi prioritas 3.

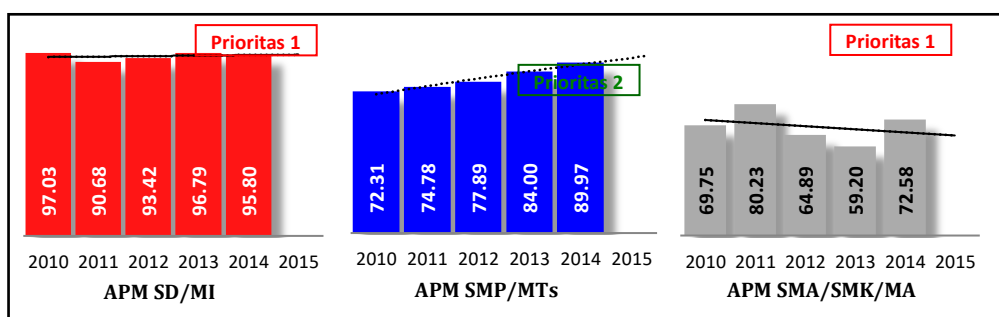
Gambar 3  
Posisi Relatif APM SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Blitar terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2014



Sumber: Publikasi BPS Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kota Blitar

Selama kurun waktu tahun 2010-2014, capaian APM untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA/SMK di Kota Blitar menunjukkan trend perkembangan yang menurun (memburuk), sehingga berdasarkan trend perkembangan antar waktu menjadi prioritas 1. Sedangkan capaian APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan trend perkembangan yang meningkat (membaik), sehingga berdasarkan trend perkembangan antar waktu menjadi prioritas 2.

Gambar 4  
Perkembangan dan Efektifitas Capaian APM Kota Blitar, Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

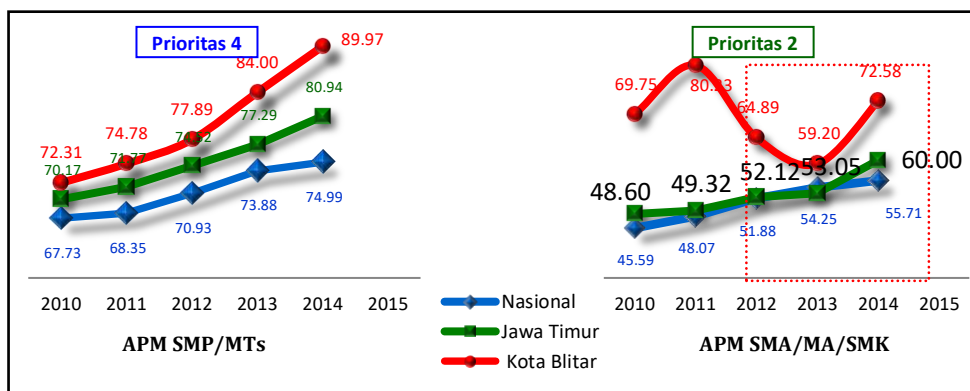
Bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, menunjukkan perkembangan APM SD/MI Kota Blitar selama periode 2010-2014 yang memiliki kecenderungan menurun tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi di provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Dengan demikian indikator APM SD/MI Kota Blitar berdasarkan relevansinya menjadi prioritas 1.

Sementara itu, perkembangan capaian APM SMP/MTs Kota Blitar periode 2010-2014 juga menunjukkan trend perkembangan yang sama dengan perkembangan di Provinsi maupun Nasional, sehingga menjadi prioritas 4.



Sedangkan APM SMA/MA/SMK Kota Blitar selama periode 2011-2013 tidak memiliki relevansi dengan perkembangan APM SMA/MA/SMK di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional sehingga menjadi prioritas 2.

Gambar 5  
Relevansi Capaian APM SMP/MTs dan APM SMA/MA/SMK Kota Blitar terhadap Capaian Provinsi dan Nasional, Tahun 2010-2014



Sumber: Publikasi BPS Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kota Blitar

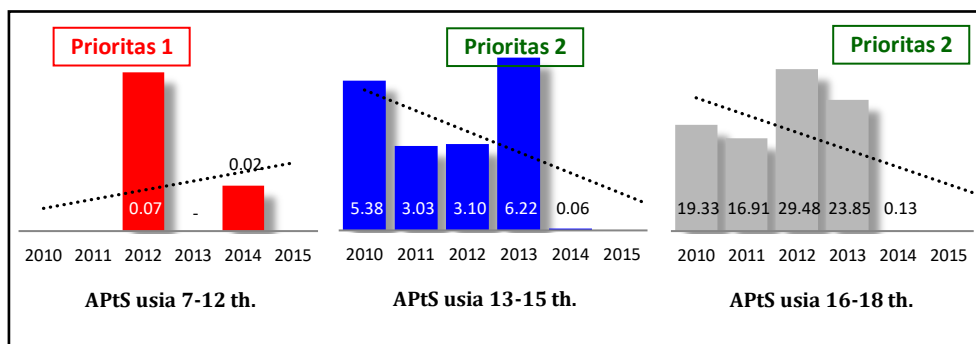
### Angka Putus Sekolah.

Di Kota Blitar, pada tahun 2014 tercatat angka putus sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun sebesar 0,02 persen, sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 0,06 persen, dan pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 0,13 persen. Sementara itu di tingkat Provinsi Jawa Timur, pada tahun yang sama angka putus sekolah kelompok usia 7-12 tahun adalah sebesar 0,46 persen, kelompok usia 13-15 tahun sebesar 6,81 persen, dan angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun di Jawa Timur adalah 39,94 persen. Secara Nasional, kondisi angka putus sekolah pada tahun 2014 untuk kelompok usia 7-12 tahun tercatat sebesar 0,66 persen, untuk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 11,80 persen, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun adalah sebesar 38,84 persen.

Dengan capaian angka putus sekolah (APtS) pada semua kelompok usia (usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun) sebagaimana uraian di atas, menunjukkan angka capaian yang lebih baik (lebih rendah) dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional, sehingga status APtS Kota Blitar pada tahun 2014 berada pada zona hijau dan indikator APtS dalam penentuan prioritas intervensi kebijakan penang-gulangan kemiskinan bidang pendidikan menjadi prioritas 3.

Perkembangan angka putus sekolah (APtS) kelompok usia 7-12 tahun, di Kota Blitar selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan trend yang meningkat, sehingga dalam penentuan prioritas menjadi prioritas 1. Sedangkan perkembangan APtS kelompok usia 13-15 tahun dan kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan trend yang menurun, sehingga dalam penentuan prioritas menjadi prioritas 2.

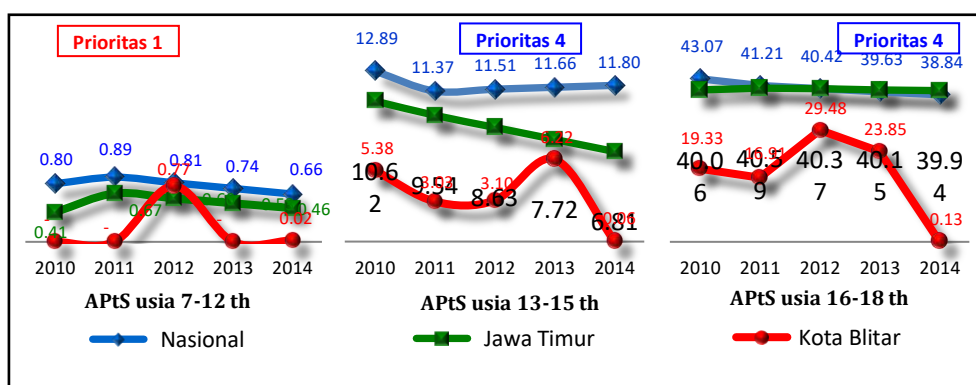
Gambar 6  
Perkembangan dan Efektifitas Capaian APTS Semua kelompok Usia Kota Blitar, Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Perkembangan capaian angka putus sekolah di Kota Blitar selama tahun 2010-2014 bila dibandingkan dengan capaian perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka akan nampak bahwa capaian APTS pada kelompok usia 7-12 tahun di Kota Blitar tidak relevan dengan perkembangan capaian APTS di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga dalam penentuan prioritas indikator APTS ini menjadi prioritas 1. Sebaliknya capaian APTS untuk kelompok usia 13-15 tahun dan kelompok usia 16-18 tahun memiliki relevansi dengan perkembangan capaian di tingkat Provinsi maupun Nasional, sehingga dalam penentuan prioritas indikator APTS pada kelompok ini menjadi prioritas 4.

Gambar 7  
Relevansi Capaian APTS Semua Kelompok Usia Kota Blitar terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2010-2014



Sumber: Publikasi BPS Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kota Blitar

### Angka Melek Huruf.

Di Kota Blitar, angka melek huruf penduduk usia 15+ pada tahun 2014 tercatat angka capaian sebesar 98,05 persen. Capaian ini berada di atas (lebih baik) dari capaian Propinsi Jawa Timur dimana pada tahun yang sama mencatat angka capaian sebesar 91,15 persen, dan rata-rata capaian secara Nasional sebesar 95,88 persen. Sehingga status capaian AMH di Kota Blitar berdasarkan posisi relatif capaian terhadap Provinsi dan Nasional berada pada zona hijau dan menjadi prioritas 3.

Bila melihat perkembangan capaian angka melek huruf penduduk Usia 15<sup>+</sup> selama tahun 2010-2014 yang menunjukkan peningkatan angka capaian dari tahun ke tahun (capaian semakin membaik), maka indikator angka melek huruf Kota Blitar termasuk prioritas 2. Apabila dibandingkan dengan perkembangan capaian di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, indikator AMH Kota Blitar sejak tahun 2010 relevan dengan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional. Sehingga berdasarkan relevansi-nya indikator ini menjadi prioritas 4.

### Ringkasan Prioritas Intervensi Kebijakan.

Dari seluruh uraian analisa prioritas intervensi kebijakan bidang pendidikan di atas, secara ringkas hasil analisa tersebut adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1  
Rangkuman Hasil Analisa Indikator Utama Bidang Pendidikan  
Kota Blitar

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
APK SD/MI	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	3,2,3
APK SMP/MTs	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
APK SMA/MA/SMK	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Memburuk dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	3,1,1
APM SD/MI	Lebih buruk dari capaian Propinsi, lebih baik dari capaian Nasional	Memburuk dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	1,1,1
APM SMP/MTs	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
APM SMA/MA/SMK	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Memburuk dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	3,1,1
APtS usia 7-12th	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Memburuk dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	3,1,1
APtS usia 13-15th	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
APtS usia 16-18th	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Melek Huruf Penduduk usia 15 <sup>+</sup>	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4

Sumber: Hasil Analisa

Dari analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 10 (sepuluh) indikator utama bidang pendidikan sebagaimana dirangkum pada tabel 8 di atas, ditemukan ada 1 indikator yang masih bermasalah pada posisi relatif Kota Blitar terhadap capaian di tingkat Provinsi yaitu indikator APM SD/MI. Untuk itu indikator APM SD/MI ini menjadi prioritas pada bidang pendidikan di Kota Blitar.

Apabila dilihat berdasarkan perkembangan antar waktu dan relevansi terhadap perkembangan capaian tingkat provinsi maupun Nasional, maka capaian indikator APK dan APM SMA/MA/SMK masih bermasalah. Sehingga meskipun posisi relatifnya lebih baik terhadap capaian di tingkat provinsi maupun Nasional, indikator ini dapat pula dinyatakan sebagai prioritas intervensi bidang pendidikan di Kota Blitar.

### **Bidang Kesehatan.**

Indikator utama untuk menggambarkan keterbatasan masyarakat (termasuk yang miskin) terhadap akses layanan dan mutu kesehatan di Kota Blitar yang tersedia data-datanya adalah, angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup; persentase balita kekurangan gizi; dan persentase kelahiran di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

### **Angka Kematian Bayi.**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Blitar, pada tahun 2013 angka kematian bayi (AKB) di Kota Blitar tercatat sebesar 18,37 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini berada di bawah capaian AKB di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 25,86 per 1.000 kelahiran hidup maupun capaian secara Nasional sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga status capaian AKB di Kota Blitar berada pada zona hijau atau prioritas 3.

Selama periode 2010-2014, perkembangan capaian AKB di Kota Blitar menunjukkan perkembangan angka capaian dengan trend menurun. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan dan program dalam rangka menekan AKB dapat berjalan efektif sehingga membawa dampak nyata pada penurunan AKB. Dengan kondisi ini, maka status indikator AKB berdasarkan perkembangan antar waktu menjadi prioritas 2.

Bila dibandingkan dengan perkembangan capaian AKB per 1.000 kelahiran hidup di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada periode yang sama, maka sebagaimana gambar 30 yang menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Blitar telah sejalan (relevan) dengan upaya-upaya Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga indikator ini berdasarkan relevansinya dapat menjadi prioritas 4.

**Angka Kematian Ibu melahirkan.**

Pada tahun 2014, capaian AKI di Kota Blitar adalah sebesar 26,6 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini berada di bawah (lebih baik) capaian AKI Propinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 98,95 per 100.000 kelahiran hidup, dan juga masih lebih baik dari rata-rata capaian secara Nasional yang terakhir tercatat sebesar 359,00 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian berdasar posisi relatif capaian AKI Kota Blitar berada pada zona hijau atau menjadi prioritas 3.

Sementara itu perkembangan capaian AKI di Kota Blitar selama periode 2010-2014 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, sehingga berdasarkan perkembangan antar waktu pada 5 tahun terakhir, indikator ini menjadi prioritas 2. Bahkan dengan capaian tahun 2014 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam menurunkan AKI belum berjalan efektif.

Sementara itu, dibandingkan dengan perkembangan capaian AKI di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2014, perkembangan capaian AKI di Kota Blitar tidak relevan dengan perkembangan capaian di tingkat Provinsi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menekan AKI belum sejalan dalam mendukung upaya-upaya Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga berdasarkan relevansinya capaian AKI Kota Blitar menjadi prioritas 3.

**Proporsi Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.**

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), pada dasarnya dapat dikatakan (secara tidak langsung) terkait dengan proses persalinan/ kelahiran. Di Kota Blitar proses persalinan/kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2014 mencapai angka 100 persen. Angka ini pada tahun yang sama berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur (94,29%) maupun capaian secara Nasional yang tercatat sebesar 87,23 persen. Dengan kondisi ini maka capaian cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih lebih baik dibandingkan capaian tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, sehingga berada zona hijau atau dalam penentuan prioritas menjadi prioritas 3.

Selama tahun 2010-2014, perkembangan capaian cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Blitar meskipun bersifat fluktuatif tetapi menunjukkan trend meningkat. Kondisi demikian menjadi indikasi bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dapat berjalan efektif dan membawa dampak pada peningkatan capaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga menjadi prioritas 2.

Kondisi perkembangan capaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Blitar sebagaimana digambarkan grafik di atas relevan dengan perkembangan capaian cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional yang juga menunjukkan trend perkembangan meningkat. Dengan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Blitar telah sejalan (relevan) dalam mendukung upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun upaya-upaya secara Nasional untuk meningkatkan capaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga indikator ini menjadi prioritas 4.

**Ringkasan Prioritas Intervensi Kebijakan.**

Dari seluruh uraian tentang analisa prioritas intervensi kebijakan di bidang kesehatan, secara ringkas hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rangkuman Hasil Analisa Indikator Utama Bidang Kesehatan**  
**Kota Blitar**

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AKB per 1000 kelahiran hidup	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
AKI per 100.000 kelahiran hidup	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Tidak Relevan	3,2,3
Proporsi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
Prevalensi Balita kekurangan gizi	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	—,—,—

Sumber: Hasil Analisa

Dari analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 4 (empat) indikator utama bidang kesehatan sebagaimana dirangkum pada tabel 10 di atas, tidak ditemukan permasalahan terkait analisis indikator. Permasalahan yang mendasar adalah ketersediaan data dasar yang mendukung analisis.

**Prioritas Wilayah Intervensi.**

Data yang tersedia untuk indikator bidang kesehatan yang dapat digunakan adalah data dari dokumen Profil Kesehatan Kota Blitar. Mengingat data dari dokumen ini hanya mencantumkan hingga basis Kecamatan sementara itu jumlah kecamatan di Kota Blitar hanya berjumlah 3 Kecamatan (dengan masing-masing kecamatan memiliki 1 Puskesmas), maka penetapan prioritas intervensi wilayah tidak menggunakan metode pemetaan dengan kuadran kartesius melainkan langsung menyebutkan wilayah kecamatan berdasarkan data yang tersedia.

- Angka Kematian IBU (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dengan prioritas wilayah di kecamatan Sananwetan, mengingat di kecamatan ini capaian AKI adalah sebesar 127 per 100.000 kelahiran hidup, sementara di dua kecamatan lainnya adalah nol.
- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dengan prioritas wilayah di kecamatan Sananwetan, mengingat di kecamatan ini capaian AKB adalah sebesar 13,96 per 1.000 kelahiran hidup, sementara di dua kecamatan lainnya masing-masing 4,64 per 1.000 kelahiran hidup di kecamatan Sukorejo dan 4,88 per 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan kidul.

**Bidang Ketenagakerjaan.****Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan data yang tersedia jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebesar 75.516 jiwa dengan kesempatan kerja (TKK) sebesar 96,20 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Blitar pada tahun 2015 sebesar 3,80 persen. Capaian TPT Kota Blitar lebih baik dibandingkan dengan kondisi TPT Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,47 persen maupun capaian TPT secara Nasional yang tercatat sebesar 5,94 persen. Sehingga dengan posisi relatif sedemikian kondisi TPT Kota Blitar berada pada zona hijau atau menjadi prioritas 3.

Selama kurun waktu 2011-2015, perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Blitar menunjukkan trend menurun. Meskipun angka capaian pada tahun 2013 sempat lebih tinggi terhadap capaian tahun 2011-2012, tetapi capaian pada tahun berikutnya (2014 dan 2015) kembali turun. Hal ini memberikan gambaran bahwa program pembangunan guna mengupayakan penurunan TPT di Kota Blitar berjalan efektif (kecuali pada tahun 2013 yang menunjukkan angka capaian lebih tinggi dari tahun sebelumnya). Sehingga berdasarkan perkembangan antar waktu, indikator ini menjadi prioritas 2.

Perkembangan TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Blitar selama periode 2010-2013, bila disandingkan dengan perkembangan TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, nampak bahwa trend perkembangan TPT Kota Blitar memiliki relevansi dengan trend perkembangan TPT di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Blitar telah sejalan dalam mendukung upaya-upaya Provinsi maupun Nasional dalam menekan angka pengangguran terbuka, sehingga indikator TPT di Kota Blitar dapat dinyatakan sebagai prioritas 4.

**Indikator Ketenagakerjaan Lainnya.**

Tabel berikut menunjukkan perkembangan indikator-indikator lain terkait dengan Ketenagakerjaan di Kota Blitar selama tahun 2010-2014. Data perkembangan capaian indikator-indikator tersebut disandingkan dengan data perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada kurun waktu yang sama.

**Tabel 3****Indikator Ketenagakerjaan Kota Blitar terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2010-2014**

	Pekerja yg Bekerja Selama <35 Jam Seminggu (dalam %)					Pekerja di Sektor Informal (dalam %)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Blitar	23,68	22,10	24,60	19,51	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jawa Timur	35,58	35,14	32,92	33,10	33,57	56,82	65,47	66,20	66,22	65,08
Nasional	30,75	31,54	31,04	33,47	31,20	66,93	62,17	60,16	60,11	59,38

Sumber: Publikasi BPS Jatim - data diolah

n/a= not available (tidak tersedia data)

**Ringkasan Prioritas Intervensi Kebijakan.**

Dari seluruh uraian tentang analisa prioritas intervensi kebijakan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan di atas, secara ringkas hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Rangkuman Hasil Analisa Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan Kota Blitar**

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
Pekerja bekerja <35 jam/minggu	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	Membaik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
Pekerja sektor non formal	Belum cukup tersedia data	Belum cukup tersedia data	Belum cukup data	—,—,—

Sumber: Hasil Analisa

Dari analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang ketenagakerjaan sebagaimana dirangkum pada tabel 12 di atas, terdapat indikator pekerja yang bekerja pada sektor non formal yang belum tersedia data untuk di analisa. Untuk 2 indikator lainnya telah menunjukkan kondisi yang baik sehingga tidak menjadi prioritas pada bidang ketenagakerjaan di Kota Blitar.

**Bidang Infrastruktur Dasar.****Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak.**

Pada tahun 2014, kondisi aksesibilitas rumah tangga di Kota Blitar terhadap air minum layak (bersih dan aman) menurut data publikasi BPS Jawa Timur adalah sebesar 73,88 persen. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan kondisi pada tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 75,64 persen, akan tetapi masih lebih baik dari capaian secara Nasional yang tercatat sebesar 69,49 persen. Dengan kondisi ini maka capaian indikator rumah tangga dengan akses air minum bersih dan aman berada pada zona kuning dan menjadi prioritas 2.

Perkembangan capaian kondisi rumah tangga miskin dengan akses terhadap air minum bersih dan aman selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) menunjukkan trend perkembangan yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian indikator rumah tangga dengan akses air minum bersih dan aman sudah berjalan efektif. Oleh karena itu berdasarkan perkembangan antar waktu, maka indikator aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak di Kota Blitar menjadi prioritas 2.

Apabila perkembangan aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak di Kota Blitar selama tahun 5 tahun terakhir (2010-2014) dibandingkan dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka nampak bahwa



perkembangan di Kota Blitar memiliki relevansi dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, se-hingga indikator ini di Kota Blitar berada pada prioritas 4.

### **Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Sanitasi Dasar Layak.**

Konsep rumah tangga dengan sanitasi dasar layak menurut BPS adalah rumah tangga yang: (1) memiliki fasilitas buang air besar baik sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa; dan (2) memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2014 kondisi rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi dasar layak berkelanjutan di Kota Blitar adalah sebesar 97,89 persen. Kondisi ini lebih baik di bandingkan kondisi pada tahun yang sama di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 63,10 persen dan kondisi secara Nasional yang tercatat sebesar 63,21 persen. Dengan kondisi ini, maka aksesibilitas rumah tangga terhadap akses sanitasi layak berkelanjutan di Kota Blitar berada pada zona hijau dan menjadi prioritas 3.

Perkembangan capaian kondisi rumah tangga tanpa akses sani tasi dasar layak dan berkelanjutan selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) menunjukan trend perkembangan yang meningkat. Hal ini menjadi indi-kasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap sanitasi dasar layak berkelanjutan berjalan efektif. Dengan demikian indi-kator ini menjadi prioritas 2.

Bila capaian perkembangan rumah tangga dengan akses sanitasi dasar layak berke-lanjutan di Kota Blitar selama periode 2010-2014 dibanding-kan dengan perkembangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional, maka akan menunjukkan trend perkem-bangan yang sama dan memi-liko relevansi terhadap perkem-bangan aksesibilitas rumah tangga terhadap sanitasi dasar layak berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional. Dengan berdasarkan kondisi relevansi ini maka indikator aksesibilitas rumah tangga terhadap sanitasi dasar layak berkelanjutan di Kota Blitar dapat ditempatkan pada prioritas 4.

### **Akses Elektrifikasi.**

Aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber penerangan berupa listrik, pada tahun 2014 di Kota Blitar telah mencapai 100 persen. Indikator ini telah berada pada capaian maksimal, dan lebih baik dibandingkan kondisi pada tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 99,69 persen demikian juga dibandingkan kondisi secara Nasional yang tercatat sebesar 97,27 persen. Dengan kondisi ini maka capaian akses elektrifikasi pada Rumah Tangga di Kota Blitar berada pada zona hijau dan menjadi prioritas 3.

Perkembangan akses elektrifikasi rumah tangga di Kota Blitar selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) menunjukkan perkembangan dengan trend meningkat Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Peme-rintah Kota Blitar untuk mening katkan capaian indikator ini telah berjalan efektif. Sehingga indikator ini berdasarkan per-kembangan antar waktu men-jadi prioritas 2.

Perkembangan aksesibilitas listrik pada rumah tangga-rumah tangga di Kota Blitar selama periode 2010-2014 bila disandingkan dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menunjukkan trend perkembangan yang sama, yaitu sama-sama meningkat. Hal ini berarti bahwa upaya Pemerintah Kota Blitar telah sejalan (relevan) dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun upaya secara Nasional untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap fasilitas listrik. Berdasarkan relevansinya maka indikator ini menjadi prioritas 4.

### Ringkasan Prioritas Intervensi Kebijakan.

Dari seluruh uraian tentang analisa indikator utama bidang infrastruktur dasar sebagaimana diuraikan di atas, secara ringkas adalah sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Rangkuman Hasil Analisa Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar**  
**Kota Blitar**

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akses air minum layak	Lebih buruk dari capaian Propinsi tapi lebih baik dari Nasional	membalik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	2,2,4
Akses sanitasi dasar layak	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	membalik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4
Akses elektrifikasi	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	membalik dalam 5 tahun terakhir	Relevan	3,2,4

Sumber: Hasil Analisa

Dari analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang infrastruktur dasar di Kota Blitar sebagaimana dirangkum pada tabel 12 di atas, tidak ada indikator yang bermasalah pada posisi perkembangan antar waktu dan relevansi dengan perkembangan di tingkat Provinsi maupun Nasional.

### Bidang Ketahanan Pangan.

#### Perkembangan Harga Beras.

Harga rata-rata beras umum hingga termurah tingkat konsumen di Kota Blitar selama tahun 2011-2015 berada pada kisaran harga Rp. 8.000,-/kg hingga Rp. 9.850,-/kg, dengan kecenderungan perkembangan harga rata-rata yang cenderung naik, bahkan pada tahun 2015 harga rata-rata beras premium di Kota Blitar berada pada kisaran harga di atas Rp. 10.250,-/kg. Sementara untuk beras medium berada pada kisaran harga Rp. 9.900,-/kg.

Harga beras lokal (dalam negeri) yang tinggi dan stabil dapat di nilai positif, karena akan memberi keuntungan bagi petani. Di sisi lain, bagi masyarakat

miskin di perkotaan (termasuk Kota Blitar) harga beras yang terlampaui tinggi akan mempersulit mereka dalam pemenuhan kebutuhan beras, karena mayoritas masyarakat miskin masih membeli beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi mereka.

Harga rata-rata beras di Kota Blitar selama periode 2011-2014, bila dibandingkan dengan harga rata-rata beras secara Nasional pada tahun yang sama masih *lebih baik*, artinya harga rata-rata beras di Kota Blitar masih sedikit berada di bawah harga rata-rata Nasional.

### Perkembangan Harga Bahan Pokok Lainnya.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2015 perkembangan harga rata-rata beberapa bahan pangan pokok utama selain beras di Kota Blitar mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga rata-rata tahun sebelumnya, kecuali pada komoditas minyak goreng curah, cabe merah, ketela pohon dan kedelai lokal yang tidak mengalami kenaikan, bahkan mengalami penurunan dari harga sebelumnya. Untuk komoditas bawang merah bahkan mengalami kenaikan harga rata-rata hingga di atas 100 persen terhadap harga rata-rata pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan harga rata-rata kebutuhan bahan pokok utama selain beras di Kota Blitar selama periode tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Perkembangan Harga Rata-Rata Tahunan**  
**Kebutuhan Pangan Pokok Utama Selain Beras di Kota Blitar**  
**Periode: 2012-2015**

Nama Komoditas	Harga Rata <sup>2</sup> (dalam Rp)				Trend
	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Gula pasir lokal	11.000	9.750	9.000	12.000	meningkat
2. Minyak goreng curah	8.000	11.500	10.500	9.500	meningkat
3. Daging sapi lokal	78.000	89.000	95.000	105.000	meningkat
4. Ayam ras	27.000	26.000	24.000	30.000	meningkat
5. Telur ayam ras	16.000	17.500	20.000	24.000	meningkat
6. Cabe merah	8.500	23.000	60.000	30.000	meningkat
7. Bawang merah	15.000	26.000	15.000	33.000	meningkat
8. Bawang putih	16.000	13.000	15.000	24.000	meningkat
9. Ketela pohon	2.000	2.000	2.000	2.000	Stabil
10. Kedelai lokal	8.000	9.000	9.000	8.500	meningkat
11. Sayur mayur:					
▪ Kol/Kubis	4.000	5.000	4.000	8.000	meningkat
▪ Kentang	8.000	9.000	8.500	12.000	meningkat
▪ Tomat	4.000	10.000	9.000	10.000	meningkat
▪ Wortel	8.000	6.000	9.000	13.000	meningkat
▪ Buncis	5.000	9.000	9.000	9.000	meningkat

Sumber: Siskaperbapo Jawa Timur – data di olah

Berdasarkan tabel di atas, terkait perkembangan harga rata-rata seluruh kebutuhan bahan pangan pokok utama selain beras, nampak bahwa hampir seluruhnya

memiliki kecenderungan (trend) meningkat. Dengan kondisi demikian, dapat dinyatakan bahwa kondisi ketahanan pangan menjadi prioritas 1, mengingat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meng-akses (membeli) kebutuhan bahan pangan (beras dan bahan pangan pokok utama lainnya) semakin tak terjangkau.

Harga rata-rata beberapa bahan pangan pokok utama selain beras di Kota Blitar bila dibandingkan dengan harga rata-rata Nasional pada beberapa bahan pangan pokok utama sejenis akan nampak sebagai-mana grafik berikut.

Dari grafik di atas menunjukkan hampir seluruh harga rata-rata kebutuhan pokok utama selain beras di Kota Blitar lebih rendah bila dibandingkan dengan harga rata-rata kebutuhan pokok utama yang sama di tingkat Nasional. Dengan kondisi yang demikian (posisi relatif terhadap kondisi Nasional), maka ketahanan pangan di Kota Blitar berada pada zona hijau atau menjadi prioritas 3.

### Ringkasan Prioritas Intervensi Kebijakan.

Dari seluruh uraian tentang analisa indikator utama bidang ketahanan pangan sebagaimana diuraikan di atas, secara ringkas adalah sebagai berikut.

Tabel 7

Ringkasan Hasil Analisa Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan Kota Blitar

Indikator Utama	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Relevansi Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4) (5)
Perkembangan harga beras	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	memburuk dalam 4 tahun terakhir	Relevan 3,1,1
Perkembangan harga bahan pokok lainnya	Lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional	rata-rata memburuk dalam 4 tahun terakhir	Relevan 3,1,1

Sumber: Hasil Analisa

Dari analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 2 (dua) indikator utama bidang ketahanan pangan di Kota Blitar sebagaimana dirangkum pada tabel 15 di atas, kedua indikator bermasalah pada posisi perkembangan antar waktunya. Untuk itu indikator perkembangan harga beras dan perkembangan harga bahan pokok lainnya menjadi prioritas bidang ketahanan pangan di Kota Blitar.

### KESIMPULAN

Dari analisis posisi relatif:

1. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 10 (sepuluh) indikator utama bidang pendidikan, ditemukan ada 1 indikator yang masih bermasalah pada posisi relatif Kota Blitar terhadap capaian di tingkat Provinsi yaitu indikator APM SD/MI. Untuk itu indikator APM SD/MI ini menjadi prioritas pada bidang pendidikan di Kota Blitar.
2. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 4 (empat) indikator utama bidang kesehatan tidak bermasalah.

3. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang ketenagakerjaan, terdapat indikator pekerja yang bekerja pada sektor non formal yang belum tersedia data untuk di analisa. Untuk 2 indikator lainnya telah menunjukkan kondisi yang baik sehingga tidak menjadi prioritas pada bidang ketenagakerjaan di Kota Blitar.
4. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 3 (tiga) indikator utama bidang infrastruktur dasar di Kota Blitar, tidak ada indikator yang bermasalah pada posisi perkembangan antar waktu dan relevansi dengan perkembangan di tingkat Provinsi maupun Nasional.
5. Perkembangan antar waktu, dan relevansi terhadap 2 (dua) indikator utama bidang ketahanan pangan di Kota Blitar, kedua indikator bermasalah pada posisi perkembangan antar waktunya. Untuk itu indikator perkembangan harga beras dan perkembangan harga bahan pokok lainnya menjadi prioritas bidang ketahanan pangan di Kota Blitar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Kesehatan RI, Pusat Data dan Informasi, 2013, Profil Kesehatan 2012, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, Jakarta.

Kementerian Sosial RI dan BPS, 2012, Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011), Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.

Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, 2011, Pedoman Penyusunan SPKD, Jakarta.

\_\_\_\_\_, <http://bps.go.id>

*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Blitar Tahun 2016 (Gyska Indah Harya)*

\_\_\_\_\_, <http://jatim.bps.go.id>

\_\_\_\_\_, <http://siskaperbapo.com/index.php>

\_\_\_\_\_, <http://www.tnp2k.go.id>